

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan Pancasila terutama sila kelima, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu penting dan sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan merata di seluruh tanah air. Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu, karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus diarahkan

sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun makin mendekati pada tujuan nasional.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Kondisi ini dapat mempengaruhi lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksinya bertambah dan kemakmuran masyarakat mengalami kenaikan.

Laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu daerah mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakatnya apabila pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus mengalami peningkatan.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus memanfaatkan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut, khususnya sektor-sektor ekonomi yang potensial bagi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan sektor ekonomi potensial diartikan sebagai upaya untuk mengubah atau menaikkan keadaan yang ada pada sektor-sektor ekonomi potensial, guna meningkatkan PDRB.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia, provinsi ini memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang cukup besar dan sangat potensial untuk dikembangkan. Adapun sektor yang memberikan kontribusi ekonomi paling besar adalah sektor pertanian. Sektor pertanian hingga saat ini masih merupakan tulang punggung perekonomian daerah, baik sebagai

penghasil nilai tambah dan devisa maupun sumber penghasilan. Komoditi unggulan nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Barat antara lain kelapa sawit, karet, tebu, dan kakao. Jagung, kelapa, lada dan sapi merupakan komoditi keunggulan daerah. Hal ini didukung pula oleh luas wilayah sebesar 146.807 km² (7,53 % luas Indonesia) dan merupakan Provinsi terluas keempat setelah Papua (421.891 km²), Kalimantan Timur (202.440 km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 km²) sehingga membuat Provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi yang strategis.

Dilihat dari letak geografis, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak (Malaysia). Di samping itu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan keuntungan letak yang strategis tersebut, Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi yang potensial bagi kenaikan PDRB. Tabel di bawah ini akan menunjukkan sektor-sektor ekonomi di provinsi Kalimantan Barat atas dasar harga konstan 2000.

Tabel 1.1
 Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2001-2008
 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Sektor Ekonomi	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Pertanian, peternakan, kehut & perikanan	5,054	25,48	5,354	25,81	5,505	25,75	5,716	25,52	5,982	25,51	6,313	25,49	6,621	25,21	7,056	25,49
Pertambangan & pengalihan	259	1,31	267	1,29	268	1,25	274	1,22	285	1,22	296	1,20	351	1,34	383	1,38
Industri pengolahan	4,522	22,79	4,517	21,78	4,430	20,72	4,521	20,18	4,574	19,51	4,684	18,91	4,820	18,35	4,909	17,73
Listrik, gas & air bersih	97	0,49	97	0,47	95	0,44	101	0,45	106	0,45	108	0,44	113	0,43	118	0,43
Konstruksi	1,461	7,36	1,559	7,52	1,617	7,56	1,729	7,72	1,847	7,88	1,956	7,90	2,063	7,86	2,196	7,93
Perdagangan, hotel & restoran	4,283	21,59	4,599	22,17	4,898	22,91	5,314	23,72	5,593	23,85	5,866	23,68	6,183	23,54	6,519	23,55
Pengangkutan & Komunikasi	1,388	7,00	1,423	6,86	1,467	6,86	1,509	6,74	1,602	6,83	1,722	6,95	1,887	7,19	2,089	7,55
Keu.real estate & jasa perusahaan	1,001	5,05	1,025	4,94	1,049	4,91	1,091	4,87	1,143	4,87	1,216	4,91	1,283	4,89	1,339	4,84
Jasa-jasa	1,773	8,94	1,901	9,16	2,048	9,58	2,229	9,95	2,406	9,96	2,607	10,53	2,940	11,20	3,074	11,10
PDRB	19838		20742		21377		22484		23538		24768		26261		27683	

Sumber: BPS, *Pendapatan Regional Propinsi Kalimantan Barat*.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Barat disumbang oleh 9 sektor, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan; jasa-jasa. Sektor ekonomi yang menyumbang angka PDRB terbesar adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas Rp 5 Miliar pada tiap tahunnya, bahkan pada mulai tahun 2006 meningkat menjadi rata-rata sebesar Rp 6 Miliar.

Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata sebesar Rp 4 miliar. Sektor ini, terus mengalami peningkatan yang cukup pesat hingga pada tahun 2007 rata-rata sektor ini menyumbang di atas Rp 6 Miliar terhadap PDRB.

Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar ketiga pada PDRB yaitu dari sektor industri pengolahan, di mana sektor ini rata-rata mampu menyumbang di atas Rp 4 Miliar pada PDRB. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar keempat pada PDRB adalah sektor jasa-jasa dengan rata-rata sebesar Rp 1 Miliar, dan mengalami peningkatan pada tahun 2003 menjadi Rp 2 Miliar hingga tahun 2007, kenaikan ini terus terjadi sampai tahun 2008 yang mencapai rata-rata di atas Rp 3 Miliar.

Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar kelima pada PDRB adalah sektor konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan dengan rata-rata antara Rp 1 Miliar sampai Rp 2 Miliar pada tiap tahunnya. Untuk dua sektor ekonomi lainnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air bersih rata-rata hanya memberikan kontribusi pada PDRB di bawah Rp 1 Miliar.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui berapa persen kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB selama tahun 2001 sampai 2008 rata-rata sebesar 25% dari total pendapatan daerah dan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata kontribusinya terhadap PDRB adalah sebesar 1% dari total pendapatan daerah. Untuk sektor industri pengolahan, rata-rata kontribusinya sebesar 17-22 % dari total pendapatan daerah. Untuk sektor listrik, gas dan air bersih, rata-rata kontribusinya sebesar 0,43 - 0,49 % dari total pendapatan daerah. Sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 7% kepada PDRB dari total pendapatan daerah. Perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 21-23% kepada PDRB dari total pendapatan daerah. Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, rata-rata kontribusinya terhadap PDRB adalah sebesar 6-7% dari total pendapatan daerah. Untuk sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, rata-rata kontribusinya terhadap PDRB adalah sebesar 4% dari total pendapatan daerah. Sedangkan sektor jasa-jasa memberikan kontribusi

sebesar 8-11% selama tahun 2001-2008 kepada PDRB dari total pendapatan daerah. Selain sektor-sektor ekonomi di atas, PDRB provinsi Kalimantan Barat juga ditunjang oleh kegiatan ekspor impor yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Persentase Kontribusi Ekspor Impor Bagi PDRB Provinsi Kalimantan Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000

Kontribusi Ekspor-Impor Provinsi Kalimantan Barat	2007	%	2008	%	2009	%
Ekspor barang dan jasa						
1. Antar negara	6.601.147,22	25,14	7.082.356,7	25,58	6.166.885,3	21,26
2. Antara provinsi	2.379.492,41	9,06	2.564.815,1	9,26	2.523.933,67	8,70
Impor barang dan jasa						
1. Antar negara	656.321,36	2,50	768.295,14	2,77	735.117,05	2,53
2. Antarprovinsi	6.123.672,53	23,32	7.167.251,83	25,89	6.806.940,13	23,47
PDRB	26.260.647,97		27.682.852,51		29.001.844,03	

Sumber: BPS, *Pendapatan Regional Propinsi Kalimantan Barat*.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa ekspor antar negara selama tahun 2007 sampai 2008 memberikan kontribusi 25% kepada PDRB kecuali pada tahun 2009 yang hanya sebesar 21,26% dari seluruh total pendapatan daerah. Untuk ekspor antar provinsi, selama tahun 2007 sampai tahun 2008, rata-rata kontribusinya sebesar 9% kepada PDRB dari seluruh total pendapatan daerah kecuali tahun 2009 yang hanya sebesar 8,70%.

Kontribusi impor antar negara, selama tahun 2007 sampai 2009, provinsi Kalimantan Barat hanya menyumbang sebesar 2% kepada PDRB-nya dari seluruh total pendapatan daerah. Kontribusinya sebesar 23% terhadap PDRB dari seluruh total pendapatan daerah kecuali tahun 2008 yang meningkat menjadi 25,89%. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut, apakah sektor-sektor ekonomi tersebut merupakan

sektor yang potensial dan harus dikembangkan di Provinsi Kalimantan Barat agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut sektor-sektor ekonomi mana saja yang dapat menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sektor-sektor ekonomi apa saja yang paling strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang paling strategis dan potensial untuk dikembangkan selain sektor-sektor yang sudah ada sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Memberikan informasi bahwa ada sektor-sektor lain yang dapat dikembangkan untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Barat selain sektor yang sudah ada.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang menitikberatkan tidak hanya pada sektor tertentu tapi ke sektor-sektor yang lain.

1.5 Studi Terkait

Studi terkait mengenai ekonomi potensial telah banyak dilakukan diantaranya, Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2005) yang meneliti tentang peranan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam sektor unggulan yaitu sektor industri makanan, minuman dan tembakau; sektor perdagangan (provinsi Jawa Timur); sektor hotel dan restoran; sektor peternakan dan hasil-hasilnya (provinsi Bali); sektor industri makanan, minuman dan tembakau; dan sektor hotel dan restoran (provinsi Nusa Tenggara Barat).

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2006) yang meneliti tentang identifikasi sektor-sektor potensial di Kabupaten Tangerang: analisis dengan metode *Shift Share*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri, perdagangan dan hotel-restoran merupakan sektor-sektor yang potensial.

Penelitian yang dilakukan oleh Malik (2010) yang meneliti tentang analisis sektor-sektor ekonomi potensial dengan studi kasus provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai lima sektor yang paling strategis dan potensial untuk dikembangkan, yaitu sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalan,

sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Nuraini (2005) mengenai jenis industri manufaktur apa saja yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa jenis industri yang potensi untuk dikembangkan adalah industri makanan, minuman, dan tembakau.

Penelitian yang dilakukan Nur Arifatul Ulya (2007) meneliti tentang peranan sektor kehutanan dalam perekonomian dan kontribusinya dalam pertumbuhan provinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan *Location Quotient*. Hasil penelitian menunjukan sektor kehutanan merupakan sektor basis dalam perekonomian Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2001-2003.

Penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazy (2009) bertujuan untuk menentukan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Alat analisis yang digunakan yaitu: Tipologi Klassen, *Location Quotient*, dan *Shift Share*. Hasil analisis persektor berdasarkan ketiga alat analisis menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Aceh Utara dengan kriteria sektor maju dan tambah pesat, sektor basis dan kompetitif adalah sektor pertanian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Choliq Sabana (2007) dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki kota

pekalongan sebagai kawasan andalan yaitu wilayah tumbuh cepat, memiliki sektor unggulan, dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah lain. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Tipologi Klassen, *Location Quotient*, *Growth Ratio Model*, *Overley*, *Shift Share* dan *Gravity Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Pekalongan dalam klasifikasi pendapatan perkapita tinggi dan pertumbuhan rendah/daerah maju tapi tertekan. Dari keseluruhan perhitungan yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ditetapkan Pekalongan sebagai kawasan andalan kurang tepat, namun demikian jika dilihat dari banyaknya sektor unggulan maupun adanya keterkaitan ekonomi antardaerah penetapan kota Pekalongan dianggap tepat.

Selanjutnya Nudiatulhuda Mangun (2007) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sektor-sektor basis/unggulan, yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi di masing-masing kabupaten/kota. Alat analisis yang digunakan Tipologi Klassen, *Location Quotient*, *Shift Share* dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kabupaten/kota mempunyai potensi masing-masing sesuai dengan kondisinya, namun sektor pertanian merupakan sektor basis yang dominan di Provinsi Sulawesi Tengah karena 9 kabupatennya mempunyai basis/unggulan di sektor ini. Sedangkan sektor lainnya bervariasi khusus seperti pertambangan dan industri pengolahan hanya dimiliki kota Palu, sekaligus sebagai kota yang paling banyak memiliki sektor basis (8 sektor basis). Dari hasil analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient*, *Shift Share* dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dapat ditentukan bahwa

kota/kabupaten yang menjadi prioritas pengembangan sektor-sektor unggulan yang dimiliki kota Toja, Una-Una mempunyai prioritas pertama untuk pengembangan wilayah semua sektor yang dimiliki.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terkait, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori yang melandasi penelitian yaitu teori-teori ekonomi makro, ekonomi mikro.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan data dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengolahan data dan pembahasan dengan dukungan teori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pengolahan data yang telah dilakukan.